

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN *FEEDLOT*
DALAM PENETAPAN HARGA SAPI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEKANISME
PASAR YANG SEHAT DAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

ABSTRAK

Kebutuhan akan Pangan merupakan suatu yang perlu disediakan oleh pemerintah karena hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Daging merupakan salah satu kebutuhan protein yang memang tidak lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga daging ini merupakan kebutuhan yang sangat primer. Kebutuhan akan daging ini selalu akan meningkat pada waktu menjelang hari raya dan lain. Banyak hal sebenarnya dalam mekanisme pasar, orang selalu menggunakan kesempatan ini untuk menahan terlebih dulu daging di peredaran kemudian pada waktu harga daging membumbung tinggi barulah dilepaskan secara perlahan sehingga keuntungan ini membludak. Inilah yang menjadikan suatu permasalahan yang perlu diselesaikan pemerintah terkait *feedlot*, yaitu penetapan harga, perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban *feedlot*.

Dasar skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penulisan dengan mendasarkan pada norma aturan dan hukum yang mengatur tentang masalah *feedlot* sapi. Adapun yang dapat dipergunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *encyclopedia*. Selain menggunakan penulisan sebagai yuridis normatif juga menggunakan penulisan yuridis sosiologis yang penulis lakukan pada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, serta Ditjen Peternakan. Penulisan yuridis sosiologis ini sebagai pendukung dari penerusan yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau *feedlot*. Pelaku usaha diindikasikan telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kebijakan pemerintah dalam pengadaan sapi ini masih belum cukup efektif dengan Undang-Undang yang ada untuk menjerat pelaku bisnis atau *feedlot* yang tetap melakukan berbagai tindakan kejahatan dan mencari keuntungan dalam situasi-situasi tertentu. Pengenaan sanksi yang tegas harus diberikan kepada pelaku usaha atau *feedlot* yang terbukti melakukan kecurangan dalam penetapan harga penggemukan sapi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban *feedlot*, pelaku usaha, penetapan harga, perlindungan konsumen, itikad baik

**JURIDICAL REVIEW OF FEEDLOTTER LIABILITY IN PRICING OF
CATTLE IN RELATION WITH CONSUMER PROTECTION BASED ON THE
PRINCIPLES OF GOODWILL IN HEALTHY MARKET MECHANISM AND
REGULATIONS IN ACCORDANCE TO THE ACT**

ABSTRACT

Food need is a vital requirement to be provided by the government because it concerns the lives of many people. Meat is one of the protein source that cannot be separated from Indonesian society, making it as a primary need. Demand for meat always increases during the upcoming days of feast and other celebrations. In market mechanism, some people take advantage of this opportunity to hold the meat and wait for the price to rise, then release it gradually to take much profit from this condition. It is one of the problems that needs to be resolved by the government regarding feedlotter issue: pricing, consumer protection, and the responsibility of the feedlotter.

The basis of this report is using normative legal research method, namely writing based on the norms and rules of law on cattle feedlotter issue. Secondary data is taken from primary legal materials which include Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Secondary legal source includes books written by lawyers, legal journals, scholars' opinions, jurisprudence and the results of symposiums related to the research topic. Tertiary legal materials include the materials that provide instructions or explanations of primary and secondary legal materials, such as legal dictionaries and encyclopedia. In addition to writing as normative jurisdiction, this study also uses sociological jurisdiction on the Ministry of Commerce and Ministry of Agriculture, and the Directorate General of Livestock. Sociological jurisdiction writing is used to support normative jurisdiction. Research results show the act of fraud conducted by business actors or feedlotter. Business actors are indicated to have violated Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Government policy on cattle procurement is not yet effective enough to take action on business actor or feedlotter conduct criminal acts and seek advantage in certain situations. The imposition of strict sanctions should be given to any business actor or feedlotter convicted of fraud in cattle pricing.

Keywords: feedlotter accountability, business actor, pricing, consumer protection, good intention.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kegunaan Penulisan	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SEBAGAI UPAYA

DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN..... 25

A. Konsep Tanggung Jawab Hukum..... 25

1. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum..... 26

2. Benrtuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum..... 30

B. Hukum Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan

Konsumen di Indonesia..... 38

1. Hukum Perlindungan Konsumen..... 38

2. Pihak-Pihak yang Terkait dengan Perlindungan Konsumen..... 42

3. Perkembangan Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan
Konsumen dan Aturan Perundang-Undangan Lainnya yang Mengatur
Mengenai Perlindungan Konsumen..... 48

C. Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Konsumen Sebagai Bentuk
Pemenuhan Hak Konsumen 53

1. Gugatan Berdasarkan Wanprestasi 52

2. Gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum..... 56

BAB III ASAS ITIKAD BAIK YANG DIEMBAN OLEH PELAKU USAHA DALAM

MELAKUKAN KEGIATAN DALAM PERSAINGAN USAHA..... 63

A. Asas Itikad Baik dalam Kegiatan Bisnis 63

1. Pengertian Asas Hukum	63
2. Sejarah Terbentuknya Asas Itikad Baik	66
3. Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Kegiatan Bisnis	69
B. Pasar Sebagai Mekanisme Kegiatan Bisnis Antar Pelaku Usaha dengan Konsumen	71
1. Pengertian Pasar Dalam Kegiatan Bisnis	71
2. Pengertian Pasar Sempurna dan Pasar Tidak Sempurna	75
a. Pasar Persaingan Sempurna.....	75
b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna	81
1) Pasar Bersaing Monopolistik.....	81
2) Pasar Monopoli.....	85
3) Pasar Oligopoli.....	91
4) Pasar Persaingan Usaha dalam Kegiatan Bisnis.....	95
C. Persaingan Usaha Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.....	99
1. Substansi Persaingan Usaha dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	103
2. Perjanjian-Perjanjian yang Dilarang.....	109
a. Oligopoli.....	109
b. Penetapan Harga	110
c. Pembagian Wilayah	111
d. Pemboikotan	112

e. Kartel	112
f. Trust.....	113
g. Oligopsoni	113
h. Integrasi Vertikal	114
i. Perjanjian Tertutup	114
j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.....	115
3. Kegiatan Yang Dilarang	116
a. Monopoli	116
b. Monopsoni.....	118
c. Penguasaan pasar.....	118
d. Persekongkolan.....	118
e. Posisi Dominan.....	119
f. Jabatan Rangkap.....	120
g. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.....	121

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN <i>FEEDLOT</i> DALAM PENETAPAN HARGA SAPI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS ETIKA BAIK DALAM MEKANISME PASAR YANG SEHAT DAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	123
---	-----

A. Penetapan Harga Oleh Perusahaan Penggemukan Sapi Berdasarkan Asas Etika Baik.....	123
---	-----

1. Peran Pemerintah dalam Penetapan harga Komoditi Sapi	123
2. Peran Perusahaan dalam Menetapkan Harga Komoditi Sapi Berdasarkan Mekanisme Pasar	132
3. Asas Itikad Baik dalam Penetapan Harga Komoditi Sapi	139
B. Perlindungan Hukum yang diberikan pada <i>End User</i> atau Konsumen Akhir atas Penetapan Harga Sapi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	142
1. Perlindungan Hukum Terhadap <i>End User</i> dalam Komoditi Sapi	142
2. Ketentuan Normatif dalam UUPK dalam Bisnis Komoditi Sapi	143
3. Perlindungan Hukum dalam Bisnis Komoditi Sapi yang Memberikan keseimbangan para pihak berdasarkan UUPK.....	150
C. Pertanggungjawaban <i>feedloter</i> dalam Penetapan Harga Sapi dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Mekanisme Pasar yang Sehat dan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	152
1. Pertanggungjawaban <i>Feedloter</i> dalam Penetapan Harga Sapi Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen	152
2. Perbuatan <i>Feedloter</i> dalam Penetapan Harga Sapi yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999	154
3. Pertanggungjawaban <i>Feedloter</i> yang Tidak Sesuai dengan Asas Itikad Baik dalam Mekanisme Pasarnya.....	156

BAB V PENUTUP.....	159
A. Simpulan	159
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	163
LAMPIRAN.....	xvii
CURICULUM VITAE.....	xviii

